



## RINGKASAN

MONICA EVRIANI. Sistem Belanja Barang Mekanisme Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor (*Direct Mechanism Goods Expenditure System at Bogor City Industry and Trade Office*). Dibimbing oleh DARNA.

Kemajuan suatu sistem dalam pengelolaan keuangan sangat berpengaruh terhadap manajemen perencanaan keuangan yang ada dikantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan, maka satuan kerja kementerian Negara/lembaga harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintahan. Satuan kerja atau lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran dari dana pemerintah, sehingga terdapat suatu prosedur pencairan anggaran belanja dari pemerintah baik secara Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Langsung (LS).

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan sistem belanja barang mekanisme Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. Isi laporan ini menguraikan bagaimana belanja barang dengan mekanisme pembayaran langsung, menguraikan sistem belanja barang mekanisme langsung meliputi dokumen yang diperlukan, pihak-pihak yang terkait, prosedur yang membentuk sistem belanja barang mekanisme Langsung, menguraikan pengendalian intern terhadap prosedur belanja barang mekanisme langsung. Hal diatas dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor pada tanggal 20 Januari sampai 18 Maret 2020.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor harus melakukan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dilakukan oleh BUD yang sebelumnya dibuat surat penyediaan dana (SPD) yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dalam belanja barang mekanisme Langsung. Pembayaran Langsung dibayarkan melalui bank BJB dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke rekening pihak ketiga atau *supplier*. Pihak-pihak yang terkait yaitu Pengguna Anggaran, BUD, Bendahara Pengeluaran, PPK, PPTK, Verifikator. Dokumen yang digunakan yaitu SPD, SPP-LS beserta dokumen pendukung, SPM-LS, SP2D. Untuk dijadikan sebagai pedoman kerja dibutuhkan Prosedur dan sistem kerja yang baik agar dapat membantu para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan. Adanya sistem prosedur kerja, sangat bermanfaat untuk mengetahui tahapan dan bagian pekerjaan yang bagaimanakah yang diperlukan untuk penyelesaian suatu bidang tugas. Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor adalah dokumen yang diperlukan dalam pencairan dana mekanisme Langsung yang diotorisasi oleh pihak-pihak yang terkait. Dibentuknya bagian verifikator untuk memverifikasi semua dokumen agar terhindar dari hal-hal yang merugikan atau tidak diinginkan oleh dinas. Kemudian akan adanya pengawasan dan pemeriksaan dalam waktu periodik dalam satu tahun Sistem pengendalian internal ini dibuat berdasarkan standar COSO (*The Committee Of Sponsoring Organizations Of treadway Commission*).

Kata Kunci: DISPERINDAG, Pembayaran Langsung, Sistem Belanja Barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies